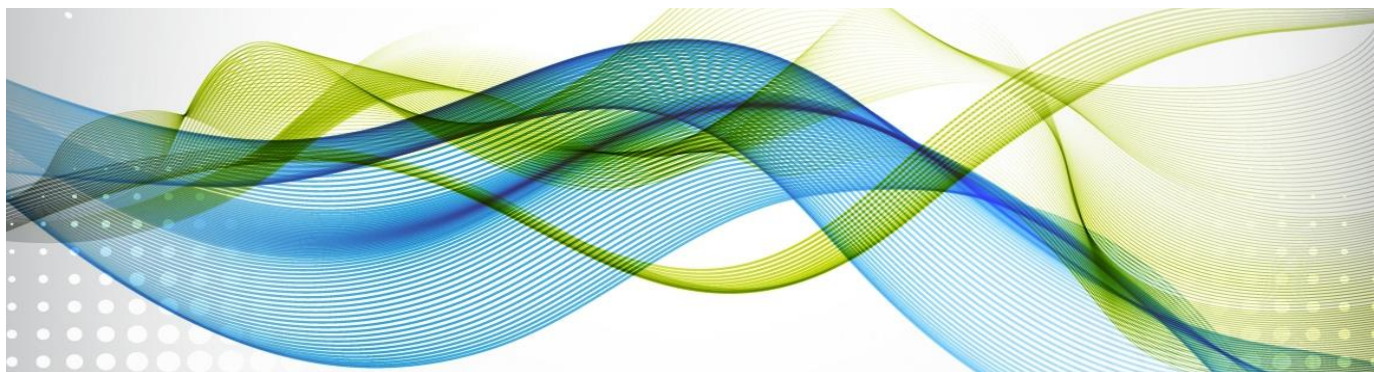


# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

**POSISI 31 DESEMBER 2020**

PT BPR KREO LESTARI

*Transparency- Accountability- Responsibility- Independency-Fairness*



## PENGANTAR

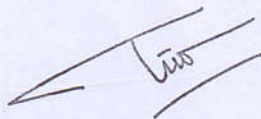
Seiring dengan semakin meluasnya pelayanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang disertai pula dengan meningkatnya volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka baik secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada peningkatan risiko Bank Perkreditan rakyat secara keseluruhan sehingga dengan ini BPR Kreo Lestari turut mendukung penuh dalam Pelaksanaan Penerapan Tata kelola pada BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, sekaligus melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), maka BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai dasar Tata Kelola

Didalam menerapkan Tata Kelola, PT BPR Kreo Lestari menitik beratkan pada prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (Fairness).

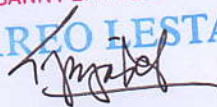
Untuk memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola sebagaimana diatur di dalam POJK tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan laporan untuk periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir.

Hormat kami,  
**PT. BPR Kreo Lestari**



**Agustinus Widarma**  
Komisaris Utama

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**KREO LESTARI**



**Susilo Priyandoyo**  
Direktur Utama

## 1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Berkaitan dengan POJK No 04/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mengacu pada Bagian Kedua mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Direksi pasal 15, dimana Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka selama tahun 2020 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut:

#### 1.1.1. RUPS-LB dengan nomor 001/KEP/RUPS-LB/I/2020 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu Pembahasan perhitungan standard gaji Pengurus Perseroan termasuk tunjangan dan fasilitas-fasilitasnya.

#### 1.1.2. RUPS-Tahunan dengan nomor 002/KEP/RUPS-LB/I/2020 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa membahas dua agenda sebagai berikut:

1. Rencana mengenai penggabungan PT. BPR Sebaru Sejahtera Lestari dan PT. BPR Kreo Lestari.
2. Hal-hal terkait penggabungan.

#### 1.1.3. RUPS-LB dengan nomor 003/KEP/RUPS-LB/III/2020 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu:

1. Pelaporan Pertanggung Jawaban Direksi atas Laporan Keuangan Tahunan tahun 2020.
2. Rencana pembagian Dividen tahun 2019.

#### 1.1.4. RUPS-LB dengan nomor 004/KEP/RUPS-LB/X/2020 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tentang persetujuan rancangan penggabungan yang dibuat secara bersama-sama antara PT. BPR Kreo Lestari dan PT. BPR Sebaru Sejahtera Lestari, sekaligus pengangkatan pengurus baru untuk PT. BPR Kreo Lestari setelah penggabungan.

#### 1.1.5. RUPS-LB dengan nomor 005/KEP/RUPS-LB/X/2020 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilaksanakan dengan agenda tunggal sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai penggabungan usaha seperti penggabungan modal inti, jumlah saham, kantor operasional dan peralihan hak dan kewajiban antara 2 BPR.

1.1.6. RUPS-LB dengan nomor 006/KEP/RUPS-LB/X/2020 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilaksanakan dengan agenda tunggal sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai perubahan anggaran dasar PT. BPR Kreo Lestari setelah merger.

1.1.7. RUPS-LB dengan nomor 007/KEP/RUPS-LB/XII/2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu:

1. Penunjukan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) dari beberapa rekomendasi sebagai penanggung pelaksanaan General audit PT BPR Kreo Lestari untuk pemeriksaan tahun buku 2020.

1.1.8. RUPS-LB dengan nomor 008/KEP/RUPS-LB/XII/2020 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilaksanakan dengan agenda tunggal sebagai berikut:

1. Pembahasan pembagian Indek Prestasi Tahunan (IPT) tahun 2020 kepada Pengurus Perseroan dan seluruh karyawan PT. BPR Kreo Lestari sebelum merger yang memenuhi persyaratan berdasarkan kinerja laporan keuangan BPR Kreo Lestari sebelum merger per tanggal 31 Oktober 2020.

## 1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

### 1.2.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berkaitan dengan POJK No.4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan berdasarkan Akta notaris nomor: 14 yang dikeluarkan oleh Riska Setiady, S.H. tertanggal 12 Oktober 2020. Sismin Bakum nomor: AHU 0075059.AH.01.02 Tahun 2020 maka susunan Direksi untuk posisi akhir Desember 2020 menjadi sebagai berikut:

#### Direksi

- Direktur Utama : Susilo Priyandoyo
- Direktur Bisnis : Ahmad Hidayat

### 1.2.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui:

1. upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.
2. perbaikan kinerja keuangan melalui baik program peningkatan penjualan kredit maupun efisiensi.
3. Mengisi pos-pos Pejabat Eksekutif (PE) APU & PPT serta Audit Internal. Terkait dengan hal ini, pengisian pos-pos PE yang lowong telah direncanakan berbarengan pada saat proses penggabungan antara dua BPR peserta penggabungan yaitu PT. BPR Sebaru Sejahtera Lestari dan PT. BPR Kreo Lestari.

### 3.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

#### 3.1.1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Berkaitan dengan POJK No.4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan berdasarkan Akta notaris nomor: 14 yang dikeluarkan oleh Riska Setiady, S.H. tertanggal 12 Oktober 2020. Sismin Bakum nomor: AHU 0075059.AH.01.02 Tahun 2020 maka susunan Dewan Komisaris untuk posisi akhir Desember 2020 sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Agustinus Widarma
- Komisaris Independen : Toni Dinoto

#### 3.1.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- Pemenuhan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK;
- Meningkatkan produktifitas dan percepatan pencapaian target Bank seusai RBB;
- Mengganti Core Banking System (CBS) dan Aplikasi-aplikasi lainnya untuk mendukung pencapaian gtarget BPR.
- Menyiapkan Proses Penggabungan dengan PT. BPR Sebaru Sejahtera Lestari
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan semua karyawan serta menumbuhkan budaya kerja yang lebih baik dan timbulnya rasa memiliki pada perusahaan.

### 3.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp80 miliar, maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

### 4. Kepemilikan Saham Direksi

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a.BPR yang bersangkutan; dan/atau	Nihil	0%
b.perusahaan lainnya;	Nihil	0%

### 5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

### 6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
a. BPR Kreo Lestari;	Nihil	6,67%
b. Kepemilikan pada BPR lain	Nihil	0%
c. Perusahaan lainnya;	Nihil	0%

7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Tidak ada hubungan keuangan maupun hubungan keluarga antar Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi. Namun demikian untuk Komisaris Utama (Agustinus Widarma) masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham yaitu anak dari Pemegang Saham Pengendali Bapak Juska Sudarto Halim dan Ibu Juniaty

8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun
a. Jumlah keseluruhan gaji	Rp859,300,000
b. Tunjangan	Rp131,300,000
c. Bonus	Rp116,100,000
d. Komponen berbasis saham	0%
e. Fasilitas Kendaraan	Kendaraan-Direksi
f. Asuransi Kesehatan	IP 1.250 Generali - Admedika

9. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Variabel	Rasio
a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;	1 : 3,00
b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;	1 : 1,21
c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah;	1 : 1,10
d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi;	1 : 1,19
e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi;	1 : 1,89

## 10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Topik	Keterangan
1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;	4x (Maret, April, Agustus dan Nopember)
2) jumlah rapat yang tidak dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;	Selama tahun 2020, rapat pengurus BPR selalu dihadiri secara fisik oleh semua anggota pengurus.
3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat; dan	Lengkap (4 pengurus)
4) topik atau materi rapat;	<p>a) Rapat ke-1 : Performa BPR berupa realisasi vs rencana kerja 2019 dan menerima laporan keuangan Tahunan 2019</p> <p>b) Rapat ke-2 : Performa BPR berupa realisasi vs rencana kerja Triwulan I 2020</p> <p>c) Rapat ke-3 : Performa BPR berupa realisasi vs rencana kerja Triwulan II 2020, Evaluasi Strategy Marketing SM 1-2020, Laporan Kepatuhan, Laporan Manajemen Risiko, Laporan HRD dan Penjualan aset BPR.</p> <p>d) Rapat ke-4 : Performa BPR berupa realisasi vs rencana kerja Triwulan III 2020 dan RBB 2021</p>

## 11. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) adalah sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
Dalam 1 tahun	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	1
Telah diselesaikan		-		-		-		1
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

## 12. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut

No.	Subjek	Jumlah		Keterangan
		Perdata	Pidana	
1	Kasus atas nama debitur Diana	(bersama dengan Alfamart sebagai tergugat ii) Merobohkan bangunan yang dijaminkan kepada Bank. Proses penanganan di pengadilan dan sudah sampai pokok perkara persidangan	Dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BPR merupakan dokumen palsu (seperti KTP, akta PT, dll). Debitur juga melarikan diri tanpa adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah. Proses dilanjutkan di kepolisian dengan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen	

## 13. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Namadan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Namadan Jabatan Pengambil Keputusan	JenisTransaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	Nihil	-	-	-	-

\*) Note:

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

## 14. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, BPR tidak melakukan pemberian dan untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik (nihil)



Terlampir Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola BPR berikut dengan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dan Kesimpulannya.



## **Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

### **Profil BPR**

Nama BPR*	PT. BPR KREO LESTARI
Alamat BPR*	JL. CILEDUG RAYA NO 77 KREO LARANGAN TANGERANG
Posisi Laporan*	Desember, 2020
Modal Inti BPR*	Rp32,480,156,112
Total Aset BPR*	Rp92,875,881,996
Bobot Faktor BPR	B

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Faktor positif pada Tata Kelola, telah terpenuhi di tahun 2020 yaitu :
  - a) Persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi
  - b) Jumlah, komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan OJK
  - c) Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK
- 2) Faktor positif pada Governance process yaitu :
  - a) Pengurus telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Anggaran dasar dan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertanggung jawabkan pada RUPS.
  - b) Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.
- 3) Faktor positif pada Governance Outcome yaitu :
  - a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawaban Pengurus selama tahun 2020 telah diterima dan mendapat persetujuan RUPS

### b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu:
  - a) Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris sudah dapat terpenuhi secara lengkap.
  - b) Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK.
- 2) Faktor positif pada Governance process yaitu :
  - a) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.
  - b) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan oleh Dewan Komisaris semata-mata untuk kepentingan BPR.

### c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sehingga tidak diwajibkan memiliki Fungsi Komite.

### d. Penanganan Benturan Kepentingan

- 1) Faktor negatif pada Governance structure yaitu :
  - a) Pada tahun 2020 BPR telah melakukan pengkinian terkait pedoman benturan kepentingan yang mengatur penanganan dan pengungkapannya

### e. Penerapan Fungsi Kepatuhan

- 1) Faktor positif Tata Kelola yaitu :
  - a) Pada tahun 2020 BPR telah melakukan pengkinian terkait fungsi kepatuhan. dan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### f. Penerapan Fungsi Audit Intern

- 1) Faktor positif pada Governance structure yaitu :
  - a) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
  - b) Selama periode laporan 2020, BPR telah memiliki PE Audit Internal, Terkait dengan rencana penggabungan dengan BPR Sebaru Sejahtera Lestari yang sedang dalam proses persetujuan dari OJK, maka posisi PE Audit Internal akan terisi dari pihak BPR Sebaru Sejahtera Lestari.

### g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan Akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

- Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **h. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

BPR sesuai dengan modal intinya, telah menerapkan Manajemen Risiko untuk risiko kredit dan risiko operasional. Namun demikian untuk system pengendalian intern masih perlu perbaikan.

#### **i. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

- BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dalam bentuk kebijakan perkreditan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- BPR telah menyampaikan laporan pelampauan BMPK dan laporan penyediaan dana pihak terkait 2020 secara benar dan tepat waktu kepada OJK.
- Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait, BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh OJK.

#### **j. Rencana Bisnis BPR**

- Rencana Bisnis Bank (RBB) telah sesuai dengan visi dan misi bank serta strategi bank yang disusun oleh para pengurus. Rencana bisnis tersebut juga telah dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham.

#### **k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

- BPR telah menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
- BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada OJK

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

NAMA BPR : PT. BPR KREO LESTARI  
POSISI : Modal Inti Rp32,480,156,112 ,-

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,79	SANGAT BAIK

**ANALISIS**

Pada Semester II tahun 2020, kelengkapan baik Pengurus maupun Pejabat Eksekutif BPR tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Oktober 2020 BPR telah melakukan penggabungan usaha dengan PT. BPR Sebaru Sejahtera Lestari, akibat penggabungan usaha tersebut terdapat peningkatan jumlah modal dan kualitas karyawan. Berkaitan dengan hal tersebut BPR berharap agar penyaluran dana dan operasional BPR makin berjalan dengan optimal, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan Tata kelola yang baik.

Di harapkan pada Semester I pada tahun 2021 Penerapan Tata Kelola dapat diterapkan lebih sempurna lagi.

Tangerang, 29 Juni 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

**KREO LESTARI**

  
**Susilo Priyandoyo**

Direktur Utama

  
**Agustinus Widarma**

Komisaris Utama